



## Implementasi Fungsi Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor BPKAD Provinsi NTB

Baiq Ismi Uswatun<sup>1</sup>, B. Malikah Salsabila<sup>2</sup>, Fajrian Pratama<sup>3</sup>, Siti Fatimah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> S1 IESP, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

<sup>1</sup>baiqismi87@gmail.com

<sup>2</sup>malikahsalsabila05@gmail.com

<sup>3</sup>fajrian2016@gmail.com

<sup>4</sup>sitifatihmah@gmail.com

### Article Info

Received: 13 Juni 2025

Revised: 18 Juni 2025

Accepted: 18 Juni 2025

**Abstrak:** Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan fokus pada implementasi fungsi pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendukung BPKAD dalam memberikan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dua isu strategis, yaitu tindak lanjut kebijakan efisiensi belanja pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden, serta pengelolaan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang adil dan akuntabel. Metode pelaksanaan meliputi observasi, asistensi teknis, diskusi terbimbing, serta keterlibatan aktif dalam proses administratif dan verifikasi data.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pemahaman regulasi oleh OPD, terutama dalam menyesuaikan struktur belanja dan dokumen pendukung tunjangan ASN. Namun melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan bersama tim BPKAD, terjadi peningkatan pemahaman dan kepatuhan administrasi di sejumlah OPD. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam memahami dinamika birokrasi serta proses implementasi kebijakan fiskal di daerah. Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat tata kelola keuangan publik secara partisipatif.

**Kata kunci:** pengabdian masyarakat, pengelolaan keuangan daerah, efisiensi anggaran, tunjangan ASN, BPKAD

### \*Corresponding Author:

Baiq Ismi Uswatun,

Fakultas Ekonomi & Bisnis,

Universitas Mataram,

Mataram, Indonesia;

Email: baiqismi87@gmail.com

**Abstract:** This community service activity was carried out through at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of West Nusa Tenggara Province, focusing on the implementation of the functions of guidance and evaluation in regional financial management. The main objective of the activity was to support BPKAD in providing guidance to Regional Government Organizations (OPD) on two strategic issues: the follow-up to government spending efficiency policies based on Presidential Regulation, and the management of civil servant (ASN) allowances in a fair and accountable manner. The implementation methods included observation, technical assistance, guided discussions, and active involvement in administrative processes and data verification.

The results of the activity show that challenges remain in the understanding of regulations by OPD, particularly in adjusting expenditure structures and supporting documents for ASN allowances. However, through the guidance and assistance provided by the BPKAD team, improvements were observed in administrative compliance and awareness among several OPD. This activity also provided students with direct experience in understanding bureaucratic dynamics and the process of implementing fiscal policies at the regional level. The community service demonstrated that collaboration between academic institutions and local governments can be an effective strategy to strengthen participatory public financial governance.

**Keywords:** community service, regional financial management, budget efficiency, civil servant allowances, BPKAD

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Segah & Kaharap, 2022)

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kompleksitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat seiring dengan tuntutan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi dan pembinaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif agar kualitas pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Fungsi pembinaan dan evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Mamangkey, Tinangon, & Budiarmo, 2023)

Pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh mahasiswa di lingkungan BPKAD Provinsi NTB menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan dan evaluasi tersebut. Keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik melalui asistensi teknis maupun penguatan sistem kerja yang berjalan, serta memberikan pengalaman langsung dalam proses tata kelola keuangan daerah (Khansa & Putri, 2023)

Melalui kegiatan pengabdian ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman praktis mengenai pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga turut berperan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penting untuk mendokumentasikan dan menganalisis proses serta kontribusi kegiatan ini sebagai bagian dari jurnal pengabdian masyarakat.

## METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada Bidang Bina Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat deskriptif dengan pendekatan partisipatif, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan kurang lebih 4 bulan dari tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 20 Juni 2025 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Observasi dan Identifikasi Permasalahan  
Tahap awal kegiatan diawali dengan observasi langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bina Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota, serta identifikasi masalah yang dihadapi dalam pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini dilakukan melalui pengamatan aktivitas kerja harian serta studi awal terhadap dokumen terkait.
2. Keterlibatan dalam Kegiatan Teknis  
Peserta magang terlibat secara langsung dalam proses administratif dan teknis
3. Studi Dokumentasi dan Analisis Data Sekunder

Untuk mendukung pemahaman, dilakukan kajian terhadap dokumen resmi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, dan laporan hasil evaluasi sebelumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pembinaan.

4. Wawancara dan Diskusi Terfokus

Kegiatan ini juga melibatkan wawancara informal dan diskusi dengan pegawai dan pejabat fungsional di BPKAD guna memperoleh informasi mendalam terkait kendala, strategi, dan praktik terbaik dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

5. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi

Pada akhir kegiatan, mahasiswa menyusun laporan akhir yang memuat deskripsi kegiatan, temuan, dan rekomendasi praktis sebagai kontribusi terhadap penguatan fungsi pembinaan dan evaluasi keuangan daerah oleh BPKAD Provinsi NTB.

Adapun aktivitas yang dilakukan selama pengabdian di Bidang Bina Evaluasi Kabupaten /Kota yaitu seperti melakukan pembinaan dengan Kemendagri dan Seluruh OPD Kab/Kota di Provinsi NTB, menyesuaikan Laporan CALK Masing-masing Kab/Kota, Mengikuti Pembinaan Terkait Mekanisme Pengelolaan Tunjangan Guru ASN. Tahap keempat, pihak kampus melakukan kunjungan langsung ke lokasi penabdian untuk memantau kondisi dan mengidentifikasi kendala yang dialami selama masa penabdian berlangsung. Tahap kelima, penyusunan laporan pengabdian, pembuatan video dokumentasi kegiatan, serta penulisan jurnal artikel sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengabdian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama kegiatan pengabdian di BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difokuskan pada dua isu utama, yaitu (1) tindak lanjut atas kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres), dan (2) penyesuaian serta pengelolaan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini memberi gambaran nyata mengenai tantangan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan nasional secara teknis di tingkat daerah.

Kegiatan pembinaan terkait efisiensi anggaran merujuk pada implementasi Perpres Nomor 14 Tahun 2024 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah, yang menekankan perlunya pengetatan terhadap belanja perjalanan dinas, belanja rapat, serta belanja barang yang tidak langsung mendukung layanan publik. Dalam konteks ini, BPKAD Provinsi NTB bertugas membina OPD agar melakukan penyesuaian belanja sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan pemerintah pusat. Mahasiswa turut dilibatkan dalam proses penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD serta membantu dalam penyusunan matriks efisiensi yang menjadi bahan evaluasi.



**Gambar 1. Pembinaan OPD dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025**

Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa beberapa OPD masih belum memahami secara menyeluruh substansi dan implikasi dari kebijakan efisiensi tersebut. Melalui kegiatan asistensi, mahasiswa bersama tim BPKAD memfasilitasi sosialisasi teknis yang menjelaskan klasifikasi belanja yang harus dihindari atau dikurangi. Selain itu, dilakukan simulasi perbandingan antara belanja sebelum dan sesudah efisiensi untuk memberi gambaran konkret terhadap potensi penghematan. Kegiatan ini sekaligus menjadi media edukasi fiskal agar setiap OPD lebih bijak dalam menyusun anggaran.

Adapun pembinaan terkait tunjangan ASN berfokus pada evaluasi dan penyesuaian pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan kinerja, beban kerja, dan kehadiran pegawai. Dalam kegiatan ini, mahasiswa membantu staf BPKAD dalam memverifikasi data kepegawaian dan menghitung simulasi TPP berdasarkan formula terbaru yang digunakan oleh pemerintah provinsi. Proses pembinaan ini penting untuk memastikan bahwa pemberian tunjangan dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.



**Gambar 2. Pembinaan Terkait Mekanisme Pengelolaan Tunjangan Guru ASN**

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa beberapa OPD mengalami kendala dalam penyusunan dokumen pendukung penyaluran tunjangan, terutama dalam aspek keterpaduan data kehadiran dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, BPKAD memberikan bimbingan teknis untuk menyusun laporan kinerja individu dan memastikan keterhubungan data dengan sistem aplikasi kepegawaian yang digunakan. Mahasiswa juga berkontribusi dalam merapikan arsip digital dan membantu validasi silang antara dokumen manual dan sistem elektronik.

Kegiatan pembinaan ini memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman dan kepatuhan OPD terhadap regulasi yang berlaku, meskipun masih dibutuhkan pendampingan lanjutan terutama dalam aspek teknis administrasi. Dari sisi mahasiswa, keterlibatan langsung dalam proses pembinaan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan pusat diterjemahkan ke dalam tindakan administratif dan operasional di daerah. Ini sekaligus menjadi refleksi bahwa reformasi birokrasi bukan hanya tentang perubahan kebijakan, tetapi juga transformasi pola kerja dan pemahaman sumber daya manusia di lapangan.



**Gambar 3. Pembinaan dengan BPKAD Kab/Kota di NTB**

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian yang berorientasi pada pembinaan OPD ini memberikan dampak positif baik bagi instansi maupun mahasiswa. Di satu sisi, instansi terbantu dalam proses asistensi dan penguatan tata kelola; di sisi lain, mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata dalam menyelesaikan persoalan birokrasi serta belajar menjembatani regulasi dengan implementasi. Ke depan, keberlanjutan kegiatan serupa dapat menjadi bagian dari model kolaborasi antara akademisi dan birokrasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien dan profesional.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian di BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Melalui keterlibatan aktif dalam pembinaan kepada OPD, khususnya terkait tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran sesuai Peraturan Presiden dan pengelolaan tunjangan ASN, mahasiswa memperoleh pemahaman langsung tentang dinamika implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah. Pembinaan yang dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman regulasi, ketepatan pelaksanaan anggaran, dan penyusunan dokumen pendukung tunjangan pegawai. Namun demikian, melalui asistensi dan pendampingan yang dilakukan oleh tim BPKAD bersama mahasiswa, terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan OPD terhadap aturan yang berlaku. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan BPKAD dalam menjalankan fungsi strategisnya. Dari sisi mahasiswa, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menjadi wadah pembelajaran praktis, tetapi juga menjadi bentuk nyata kontribusi akademik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan transparan. Pengalaman ini memperkaya perspektif mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan publik serta pentingnya sinergi antara kebijakan, administrasi, dan pelaksanaan teknis di lapangan. Bagi BPKAD, disarankan untuk terus meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan kepada OPD, terutama dalam bentuk bimbingan teknis dan pendampingan berkelanjutan agar kebijakan efisiensi dan pengelolaan tunjangan ASN dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh perangkat daerah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bidang Bina Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat atas kesempatan bimbingan, dan pengalaman selama pengabdian. Dalam masa pengabdian penulis tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis seputar pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga merasakan suasana kerja yang hangat dan penuh semangat. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak Prodi IESP FEB Universitas Mataram dan dosen pembimbing atas dukungan dan arahnya dalam pelaksanaan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anandita Vivian Salsa Billa, Mely Widiyastuti, Olivia Yonata, & Yesi Lita Sari. (2024). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1(3), 173–182. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i3.265>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NTB. (2025). Retrieved from <https://bpkad.ntbprov.go.id/>
- Bahar, A. N., Risal, M. C., & Hisbullah. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Melalui Peran Pengawas Internal. *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3(3), 560–567.
- Hasanah, U., Nirmala, D., Faradina, M. P., Aisyah, S., Hartatik, S. S., & Abrori, R. (2023). Pemberdayaan Peran Mahasiswa Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja BPPKAD

- Kabupaten Sumenep Pada Program MKBM Magang Industri. *Nanggroe*, 2(3), 391–399. Retrieved from file:///C:/Users/MyBook Hype/Downloads/324-1016-1-PB.pdf
- Jenderal, D., Keuangan, B., & Negeri, K. D. (2019). Pengelolaan Keuangan Daerah. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/6075>
- Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penyesuaian Rincian Anggaran Tahun 2025. (2025), 2025, 1–23. Retrieved from <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/9070a92a-236a-43f2-f733-08dd44107330>
- Khansa, J. F., & Putri, A. M. (2023). Implementasi MBKM Pada BPKAD Kota Pekanbaru. *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 43–48. <https://doi.org/10.61227/inisiatif.v2i1.114>
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.58784/rapi.65>
- Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Permendagri No 77 Tahun 2020*, 1–445.
- Rohmi, P. K. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara, 1, 155–162.
- Sabili, E. H., & Sunaningsih, S. N. (2022). Peran BPKAD Dalam Penyajian Data Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2083. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1379>
- Salsiyah Peparung gusti, herabudin salamtul alfiyah. (2022). pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik di dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan kota bandung tahun 2018-2020. *Jurnal Birokrasi Dan Pemerintah Daerah*, 4(2), 1–23. Retrieved from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/19456>
- Segah, B., & Kaharap, K. (2022). PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DARI PENGAWASAN: Good Regional Financial Management as an Element of Supervision. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 42–46. Retrieved from <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/restorica>
- Suhaila, S. (2021). Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Good Governance*, 17(1). <https://doi.org/10.32834/gg.v17i1.254>
- Wanti, V., Wulandari, F. R., & Darmanto. (2023). Evaluasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Pendahuluan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Dindikbud ) Kabupaten Purbalingga merupakan Organisasi Perangkat. *Ministrate, Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(4), 156–169. Retrieved from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/32346>
- Wasih, W., & Tama, M. M. L. (2023). Manfaat Mahasiswa Magang Dalam Program MBKM Kerjasama Antar Universitas Bina Darma Palembang Dengan Pemkab Banyuasin. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 536–547. Retrieved from <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/874/674>